



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

BANJARBARU

Banjarbaru, 25 Maret 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro /
Unit Kerja / UPT Lingkup Pemprov.
Kalsel.
2. Direktur RSUD Ulin/ RS Dr.H.M.
Ansyari Saleh/ RS Gigi dan Mulut Gt.
Hasan Aman / RS Jiwa Sambang
Lihum
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.3.6/1366/BPBJ/2025

PENDAFTARAN AKUN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6, serta dalam rangka peningkatan layanan dan efektivitas penggunaan sistem Katalog Elektronik dalam mendukung pengelolaan Katalog Elektronik yang lebih optimal dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penonaktifan Etalase pada Katalog Elektronik Versi 5 telah dilakukan secara bertahap sejak Oktober 2024. E-purchasing pada Katalog Elektronik Versi 5 dapat digunakan secara terbatas pada barang/jasa yang belum dinonaktifkan sampai dengan tanggal 20 Maret 2025, sepanjang tidak dimungkinkan dilaksanakan dalam Katalog Elektronik Versi 6.
2. Metode pemilihan E-purchasing wajib dilaksanakan melalui Katalog Elektronik Versi 6 untuk seluruh produk yang telah tersedia di Katalog Elektronik Versi 6, termasuk ketersediaan mekanisme pembayarannya.
3. Setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan wajib mendaftarkan akun dalam Aplikasi e-Katalog Versi 6 untuk memastikan kelancaran proses pengadaan barang/jasa.

4. Pendaftaran akun dalam Aplikasi e-Katalog Versi 6 menjadi hal yang penting untuk mendukung transisi ke sistem baru serta mencegah potensi hambatan dalam pelaksanaan belanja SKPD sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan akan berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
5. Agar seluruh SKPD/UPT/UPPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut mendorong para pelaku usaha UMKK untuk mendaftarkan dan menayangkan produknya di Katalog Versi 6.
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memberikan fasilitas pendampingan terhadap penyedia yang masih memiliki kendala dalam pendaftaran Katalog Versi 6 dan proses perpindahan dari Katalog Versi 5 ke Katalog Versi 6 melalui Helpdesk LPSE (WA Official) : **0811 500 550** serta dapat juga datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. A. Yani Km. 5 Komp. Dharma Praja No. 22 di Banjarmasin.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, MPd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671030 199412 1 003

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Arsip.